



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 877/VIII/2015

IV/AGUSTUS 2015



PERLU KERANGKA JELAS TINDAKLANJUTI PENGAWASAN DPR



**BAHAS EKONOMI
TERKINI,
DPR PANGGIL
GUBERNUR BI**



**PEMERINTAH HARUS
KEMBANGKAN
SENTRA PERTANIAN
DI LUAR JAWA**

Jangan lewatkan
info DPR terkini
dan live streaming
TV Parlemen di
www.dpr.go.id



PERLU KERANGKA JELAS TINDAKLANJUTI PENGAWASAN DPR



Pimpinan DPR dalam Sidang Paripurna Khusus HUT-70 DPR RI

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR merasakan bahwa tindak lanjut dari kegiatan pengawasan belum memberikan hasil yang maksimal. Untuk itu perlu ditetapkan kerangka kerja yang jelas atas penindaklanjutan hasil kegiatan pengawasan. Selain itu DPR juga perlu membuat rencana kegiatan berdasarkan skala prioritas. Dengan perbaikan-perbaikan ini diharapkan pelaksanaan pengawasan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Demikian ditegaskan Ketua DPR Setya Novanto saat menyampaikan Pidato menyambut HUT-70 DPR-RI dalam Sidang Paripurna, di Ruang Gedung Nusantara Jum'at (28/8).

Pada Sidang Paripurna khusus yang dihadiri seluruh Pimpinan dan para anggota Dewan serta sejumlah mantan Pimpinan dan pejabat serta mantan pejabat Setjen DPR, lebih lanjut Setya Novanto mengemukakan, DPR RI telah membentuk 4 (empat) Tim yang berada di Pimpinan dan 38 (tiga puluh delapan)

Panitia Kerja (Panja) di AKD.

Tim tersebut adalah Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Tim Implementasi Reformasi DPR RI; dan Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Pengawasan yang dilakukan juga dalam bentuk memberikan persetujuan dan pertimbangan atas usulan pengangkatan pejabat publik antara lain untuk Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara, Anggota Lembaga Sensor Film, Hakim Agung, Pimpinan KPK, dan Kapolri. Selain itu, DPR RI juga telah memberikan pertimbangan 29 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara-negara sahabat untuk Indonesia.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, pada tahun sidang 2014–2015, DPR telah melakukan pembahasan

dan persetujuan terhadap RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015, pembahasan dan persetujuan mengenai pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2016, serta membahas Laporan Semester I (satu) dan Prognosis Semester II (dua) Tahun Anggaran 2015.

Sedangkan bidang legislasi, politisi FPG ini menyatakan, DPR dan Pemerintah telah menyepakati Prolegnas Tahun 2015–2019 sejumlah 160 (seratus enam puluh) RUU dan 37 (tiga puluh tujuh) RUU menjadi prioritas pada tahun 2015 yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna 6 Februari 2015. Menjelang akhir Tahun Sidang, terdapat penambahan jumlah RUU dan penggantian judul RUU yang masuk dalam prioritas Tahun 2015, sehingga jumlah Prolegnas Prioritas Tahun 2015 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) RUU.

Selama Tahun Sidang 2014–2015, DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan terhadap 12 (dua belas) RUU, dan DPR juga telah menyelesaikan beberapa Peraturan DPR RI.

Di bagian lain, Novanto menegaskan, DPR tetap berkomitmen meningkatkan kecepatan dalam memberikan tanggapan atas surat pengaduan dan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan. Aspirasi dan pengaduan masyarakat dapat disampaikan ke DPR melalui tiga cara, yaitu secara online dan pesan singkat atau SMS, melalui surat, atau datang langsung ke DPR. Dalam acara ini Ketua DPR Setya Novanto menyerahkan laporan kinerja DPR kepada mantan Ketua DPR Agung Laksono, juga hadir mantan Ketua DPR Akbar Tanjung dan Wakil Ketua DPR Tosari Wijaya. (mp) foto: iwan armanias/parle/hr

PEMBAHASAN RUU LALU LINTAS DEVISA DIPERCEPAT



Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon gelar jumpa pers bersama Gubernur BI

Wakil Ketua DPR Fadli Zon memastikan akan segera membahas Undang-undang Lalu Lintas Devisa, untuk menjadi payung hukum lalu lintas devisa di Indonesia atas imbauan Bank Indonesia (BI). Langkah ini sebagai antisipasi ancaman krisis ekonomi di Indonesia.

“Soal lalu lintas devisa, itu harus ada payung hukumnya, salah satunya adalah usul inisiatif DPR, yakni UU Lalu Lintas Devisa,” kata Fadli, usai pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, di Gedung Nusantara III, Rabu (26/08/15) petang.

Politisi F-Gerindra ini mengatakan, DPR sudah memasukkan soal lalu lintas devisa dalam revisi UU BI dan Perbankan. UU ini nantinya akan mewajibkan kepada para pengusaha untuk memasukkan uang dari hasil ekspornya kepada bank dalam negeri.

“Sebenarnya, lalu lintas devisa tidak memerlukan UU yang baru, cukup dimasukkan dalam UU yang sudah ada. Bahkan, revisi UU ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Mudah-mudahan bisa mulai dibahas tahun ini, karena ini penting, jadi kita mulai UU JPSK (Jaring Pengaman Sistem Keuangan), baru setelah itu UU BI dan Perbankan,” jelas Fadli Zon.

Politisi asal Dapil Jawa Barat ini memastikan, pembahasan RUU ini bisa direalisasikan, namun perlu koordinasi dengan berbagai instansi.

Sebelumnya, Gubernur BI meminta agar masyarakat dan dunia usaha agar tetap tenang dan tidak panik menghadapi kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Agus menyarankan pada eksportir agar melepas kurs dolarnya agar ada suplai tersedia dolar dalam negeri.

“Mohon rakyat Indonesia tetap tenang dan kami tahu dunia usaha banyak yang kuatir punya utang dalam dan luar negeri dan tidak melakukan lindung nilai. Itu harus hati-hati mengelola perusahaannya dan kami ingatkan itu setahun lalu,” saran Agus. (sf) foto: iwan armanias/parle/hr

DPR DAN PARLEMEN TIMOR LESTE SIAP MAJUKAN HUBUNGAN BILATERAL

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste menjadi pembahasan utama dalam pertemuan Pimpinan DPR RI dengan Perdana Menteri Timor Leste, Rui Maria de Araujo, beserta jajaran Menteri. Pertemuan tertutup dipimpin oleh Ketua DPR RI Setya Novanto di Gedung Nusantara III, Rabu (26/08/15).

Dalam kesempatan ini, Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan Fahri Hamzah, serta Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais (F-PAN) dan Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam (F-PKB).

“Saya memberikan apresiasi dan penghormatan kepada Perdana Menteri Timor Leste, karena bersama para Menteri ini sangat baik dalam hal kerja sama antar bilateral Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Timor Leste,” kata Novanto usai pertemuan.



Pimpinan DPR menerima PM Timor Leste

Novanto menambahkan, dalam pertemuan itu juga dibahas terkait perbatasan darat dan laut. Hal terkait

investasi, pendidikan, keamanan dan pertahanan juga akan ditingkatkan. Novanto yakin, banyak potensi kerja

sama yang bisa dikembangkan oleh kedua negara. Potensi kerja sama tersebut tidak saja berkaitan dengan aspek ekonomi, perdagangan dan investasi, tetapi juga aspek sosial-budaya dan pariwisata.

Apalagi, tambah Novanto, Menteri Pertahanan Timor Leste, telah menjelaskan para perwiranya yang sudah masuk ke dalam Lemhanas. Sementara dalam hal pendidikan, Menteri Pendidikan Timor Leste mengatakan bahwa kerjasama bidang pendidikan kedua negara akan ditingkatkan.

“Tapi yang penting adalah *people and contact* antara kedua negara akan kita tingkatkan, khususnya yang berkaitan juga antar parlemen kedua negara. Upaya memperkuat kerja sama bilateral Indonesia dengan Timor Leste juga tidak cukup dilakukan hanya melalui hubungan dan kerjasama antar-pemerintah, tetapi juga perlu dilakukan dan didukung oleh diplomasi antar-parlemen kedua negara,” jelas Politisi F-PG ini.

Sementara sebelumnya dalam sesi pertemuan tertutup, Novanto menyampaikan, di forum-forum parlemen internasional, DPR RI dan Parlemen Timor Leste juga perlu memperkuat kerja sama.

“Terkait hal ini, kami mengundang Parlemen Timor Leste untuk hadir dan berpartisipasi dalam Konferensi ke-6 GOPAC atau *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption* yang akan diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 6 – 8 Oktober 2015,” ungkap Novanto.

Di bagian lain, Ketua DPR mengatakan pada bulan Februari 2015, DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kerja Sama dengan Timor Leste, khususnya di bidang pertahanan. Hal tersebut merupakan salah satu pencapaian penting bagi hubungan bilateral Indonesia – Timor Leste.

Sementara itu, Perdana Menteri Timor Leste, Rui Maria de Araujo, berharap kunjungan ini dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

“Bersama DPR, kami mengadakan diskusi. Ketua DPR sudah menjelaskan, kerjasama antara kedua negara berjalan dengan baik. Dengan kunjungan ini kita harapkan kerjasama antar pemerintah akan meningkat lagi, termasuk kerjasama antar masyarakat juga,” kata Perdana Menteri, dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Dalam kesempatan ini, PM Timor Leste didampingi beberapa menteri, diantaranya *Senior Minister And Minister For Coordinating Of Economic Affairs And Minister Of Agriculture And Fisheries of RDTL*, Estanislau da Silva; *Senior Minister And Minister For Coordinating of Social Affairs And Minister Of Education of RDTL*, Antonio da Conceicao; *Minister of Foreign Affairs And Cooperation of RDTL*, Hernani Coelho; *Minister of Finance of RDTL*, Santina Cardoso; *Minister of Defense of RDTL*, Cirilo Christovao; dan *Ambassador of The Democratic Republic Timor Leste To RI*, Manuel Serrano. (sf) foto: iwan armanias/parle/hr

BAHAS EKONOMI TERKINI, DPR PANGGIL GUBERNUR BI

Kondisi ekonomi saat ini, menjadi sorotan berbagai pihak. Selain pelambatan pertumbuhan ekonomi, masalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pun tak luput menjadi perhatian DPR. Untuk membahas hal ini, Pimpinan DPR mengundang Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo.

Dipimpin langsung oleh Ketua DPR Setya Novanto, pertemuan berlangsung secara tertutup di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Lantai III, Rabu (26/08/15) petang. Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

“Tentu apa yang akan disampaikan oleh Gubernur BI, akan menjadi perhatian kami. Apa yang dialami ekonomi Indonesia saat ini, akibat dari kondisi dunia. Kita akan mencari jalan keluar bersama, antara DPR dan Pemerintah,” kata Novanto sebelum pertemuan.

Usai pertemuan, Fadli mengatakan, pihaknya sudah mendengar langsung dari Gubernur BI terkait bagaimana pandangan dan apa yang sudah dilakukan Bank Indonesia menghadapi situasi ekonomi sekarang ini. Termasuk bagaimana BI membaca faktor eksternal dan internal dan respon atau intervensi terhadap kondisi saat ini.

“Kita juga berdiskusi tentang berbagai hal, seperti menyangkut masalah yang *real* dan kongkrit, termasuk kira-kira sampai sejauh mana pelemahan nilai tukar rupiah ini bisa terjadi. Kita akui, faktor-faktor eksternal itu memang



Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon, menerima Gubernur BI

banyak di luar kendali kita. Sehingga kita sulit untuk memprediksi. Walaupun dari data-data yang ada, dari sisi inflasi, cadangan devisa, kita relatif masih kuat dan bagus. Tetapi soal Surat Utang, faktor The Fed, dan devaluasi Yuan, ini di luar kendali kita,” papar Fadli.

Dari hasil diskusi, Fadli mengatakan, untuk mengantisipasi hal ini, perlu koordinasi banyak lembaga. Lembaga-lembaga ini harus duduk bersama dengan Presiden.

“Kita tidak bisa menyajikan prediksi yang tidak punya dasar. Lebih bagus, saya menyarankan untuk menghadapi ini secara konservatif. Lebih bagus kita menghadapi satu krisis, daripada menganggap ini bisa kita *handle*, tapi kenyataannya tidak bisa. Jadi lebih bagus kita mempersiapkan itu,” imbuah Politisi F-Gerindra ini.

Fadli menyarankan, untuk menghadapi kondisi ekonomi yang kurang bersahabat ini, Pemerintah juga perlu mengerahkan potensi dalam negeri. Supaya kondisi domestik bisa bertahan terhadap arus kiris yang sudah melanda

secara global.

“Kita memiliki potensi. Misalnya bagaimana proses percepatan penyerapan anggaran, dimana saat ini masih rendah. Itu salah satu masalah. Dimana letak koordinasi agar penyerapan anggaran ini lebih cepat,” saran Politisi asal Dapil Jawa Barat ini.

Kemudian di sektor-sektor nasional lain, Fadli berharap agar sektor itu dapat berkembang tanpa terkena imbas krisis ini. Terutama yang menjadi concern adalah buruh dan kekuatan perusahaan. Tentunya, imbuh Fadli, perlu ada kebijakan yang pro kepada pertumbuhan.

“Kita lihat, langkah yang diambil BI sudah sesuai dengan prosedur. Kami ingatkan bahwa faktor eksternal maupun internal tidak ada garansi, sejauh mana menahan dari pelemahan nilai tukar rupiah ini. BI pun tidak bisa menjamin hal itu. Itu sangat tergantung pada faktor pasar,” ingat Fadli.

Sementara itu, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, dalam pertemuan itu, ia memaparkan kepada Pimpinan DPR khususnya terkait nilai tukar yang lebih disebabkan faktor eksternal atau kondisi ekonomi global. Di mana saat ini, kata Agus, ekonomi Amerika tengah membaik dengan menaikkan bunga. Ini berbanding terbalik dengan kondisi di Cina yang mengalami pelemahan nilai tukar sebab devaluasi Yuan. Selain itu, harga komoditi yang selama tiga

tahun terus mengalami penurunan.

“Ini semua berdampak pada penurunan jumlah uang ke Indonesia, karena terakhir memang pasar modal dunia sedang mengalami kejatuhan. Indonesia juga terjadi kejatuhan dan itu menyebabkan ada dana keluar,” jelas Agus.

Agus menjelaskan, pertumbuhan Indonesia yang mengalami penurunan selama dua tahun terakhir hingga menyusut sampai 4,7 persen. Namun, itu dapat dimengerti sebab ekonomi global yang juga menurun. Menurutnya, di awal BI dan pemerintah tengah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dikuartal I dan II 2015 berada di kisaran 5-5,1 persen. Meskipun kenyataannya saat ini berada di 4,7 persen.

Selain itu, Agus menjelaskan melemahnya ekonomi Indonesia dilatarbelakangi karena pemerintahan baru serta APBN yang baru disetujui pada Februari. Ada penyesuaian nomenklatur, pengisian jabatan, dan juga perlu ada proses pengaanan lelang dan sebagainya. Agus berjanji, BI memberikan jaminan akan senantiasa berada di pasar dan menjaga stabilitas pasar valuta asing.

“Kita ceritakan juga langkah-langkah apa yang harus dilakukan BI bersama pemerintah untuk merespon kondisi yang berkembang ini. Namun kami juga mendapat masukan, sehingga ini menjadi bagian agar Indonesia mempersiapkan diri menghadapi tantangan,” tutup Agus. (sf/ foto:iwan armanias/parle/iw.

DPR MINTA BPK AUDIT BI

Jelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, Pimpinan DPR dan Pimpinan Badan Anggaran menggelar rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro. Isu ekonomi terkini juga turut dibahas.

“Kami melakukan koordinasi antara Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, terkait pembahasan RAPBN 2016 yang sudah akan dimulai, dimana ini untuk kepentingan yang lebih jauh. Tindak lanjut bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga perlu koordinasi bersama,” kata Ketua DPR Setya Novanto, usai pertemuan di Gedung Nusantara III, Senin (24/08/15) malam.

Menanggapi nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dolar AS, Novanto meminta kepada Komisi XI DPR untuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu kepada Bank Indonesia (BI).

“Kalau kurs rupiah sudah Rp14 ribu lebih, saya minta kepada Komisi XI untuk melibatkan BPK supaya BPK mengadakan audit. Hal ini untuk mengetahui bagaimana kesiapan BI terhadap dolar yang semakin menguat, sehingga persiapan kita dapat dipercepat. Dengan terlibatnya BPK, ini dapat memberikan masukan yang lebih jauh,” tegas Politisi F-PG ini.

Novanto juga mengapresiasi langkah Pemerintah melalui Menkeu untuk melakukan koordinasi kepada DPR, sehingga pembahasan dapat berjalan lebih transparan. Dengan adanya koordinasi ini, persepsi antara DPR dengan Pemerintah juga dapat disamakan.

“Saya berterima kasih kepada Menkeu yang selalu



Ketua DPR Setya Novanto dan Menkeu

melakukan koordinasi. Tentu saya mengapresiasi terkait kondisi ekonomi saat ini, karena perencanaan Presiden dan para Menteri juga cepat, Menkeunya juga cepat dalam menindaklanjuti. Mudah-mudahan ini berjalan lancar,” harap Politisi asal Dapil NTT ini.

Dalam kesempatan yang sama, Menkeu mengatakan bahwa rapat koordinasi ini hampir sama dengan pembahasan APBN-Perubahan 2015. Koordinasi untuk menyamakan pan-

dangan, sehingga pembahasan APBN 2016 ini lancar.

“RAPBN 2016 ini berada berada di kondisi yang tak menentu. Market juga sangat buruk di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Yang diharapkan untuk bisa menahan kondisi ekonomi yang lagi berat ini adalah *government spending*, yang tidak lain adalah APBN dan APBD,” kata Menkeu.

Menkeu menambahkan, DPR dengan Pemerintah sepakat untuk memfokuskan pada penguatan pada struktur APBN, baik asumsi maupun struktur belanja yang diharapkan bisa

menjadi jalan keluar dari tren perlambatan ekonomi yang sampai hari ini terjadi.

“Soal kurs rupiah juga menjadi pembahasan. Waktu kita mencantumkan asumsi makro dalam Nota Keuangan itu semua berdasarkan *arrange* yang kita sepakati bersama DPR. Tentunya kita juga sepakat untuk rasional, dalam pengertian melihat bagaimana kondisi sebenarnya. Terutama devaluasi China, dan perkembangan terakhir. Nanti dibahas dulu dengan Banggar, baru kita sepakati,” jelas Menkeu. (sf)/foto:denus/parle/iw

Tiga Pameran Meriahkan HUT RI dan DPR

DPR RI menghadirkan tiga pameran sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI dan Hari Lahir DPR yang sama-sama memasuki usia 70 tahun. Tiga pameran tersebut adalah pameran filateli, pameran numismatika dan pameran batu jasper serta batik dari motif batu jasper.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan dewan dalam posisi siap mendukung inisiatif dari masyarakat dan ini sesuai pula dengan komitmen untuk menjadikan gedung parlemen sebagai rumah rakyat. “Pameran kali ini datang dari masyarakat dari komunitas yang tentu harus kita dukung, kegiatan kreatif apalagi yang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/15).

Dalam sambutannya politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengaku sampai saat ini masih menekuni hobi filateli dan numismatika dengan terus melengkapi koleksinya. Baginya mengoleksi perangko memiliki makna tersendiri karena bukan hanya sekedar bukti lunas bea pos tetapi juga merekam perjalanan sejarah suatu bangsa.

Ia juga menyambut baik rencana terbitnya seri perangko khusus 70 tahun DPR RI pada 29 Agustus nanti yang sekaligus menyosialisasikan langkah dewan menuju parlemen modern. Fadli berharap dengan dukungan DPR peminat hobi koleksi perangko dan mata uang dapat terus bertambah terutama dari generasi muda.



Wakil Ketua DPR Fadli Zon, membuka pameran sambut HUT 70 DPR-RI

“Di manca negara peminat ini sering disebut sebagai *king of hobbies* dan sekaligus *hobby of the king* karena yang mengoleksi ini biasanya para bangsawan,” tuturnya. Usai pembukaan pameran Wakil Ketua DPT didampingi Ketum Filatelis Indonesia Letjen Purn. Suyono meninjau sejumlah koleksi yang ditampilkan.

Secara khusus ia juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus organisasi batu mulia jasper karena telah menemukan kreasi baru yaitu batik jasper. Tidak seperti batu akik, jasper yang banyak dipasang sebagai liontin memiliki keunikan dan sulit mencari motif yang sama. Dalam kondisi krisis saat ini diharapkan batu mulia dan batik jasper dapat mendongkrak ekonomi masyarakat. (iky) foto: jaka/parle/hr.

Pimpinan DPR Terima DPRD NTB



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, didampingi anggota asal NTB menerima DPRD NTB

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah didampingi anggota Komisi I, M. Syafrudin Bajo dan anggota Komisi XI Willgo Zainar menerima perwakilan anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Jumat (21/8) di ruang rapat Pimpinan DPR RI, Senayan Jakarta.

“Kedatangan kami bertemu Pimpinan dan anggota DPR RI ini untuk meminta bantuan, agar mendorong pemerintah untuk membuktikan janji Presiden Jokowi saat kedatangannya ke NTB beberapa waktu lalu, yakni menyertakan anggaran pemerintah sebesar 1,8 Triliun untuk penyelesaian pembangunan kawasan wisata Mandalika yang akan dijadikan satu destinasi wisata baru di Indonesia,” ungkap Sekretaris

Komisi II DPRD Provinsi NTB, Yekagil.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berjanji akan mempertanyakan dan membicarakannya kepada Presiden. Pasalnya dalam RAPBN yang telah disusun pemerintah, tidak dialokasikan anggaran untuk penyelesaian pembangunan kawasan Mandalika, Lombok Tengah yang pengerjaannya ditangani oleh ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) sebagai BUMN.

Ditambahkan Syafrudin Bajo, pembangunan kawasan Mandalika itu tidak hanya terbatas pada permasalahan pariwisata semata, melainkan juga perekonomian NTB, khususnya daerah Lombok Tengah secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan dalam *grand design* pembangunan kawasan itu direncanakan untuk dibangun beberapa fasilitas lainnya, seperti infrastruktur jalan yang memadai, lapangan golf, bahkan konon juga akan di bangun tempat balap mobil F1.

Delegasi DPRD NTB juga mempertanyakan konektivitas daerahnya dengan daerah-daerah lain disekitarnya. Pasalnya penerbangan ke provinsi tersebut selama ini masih terbatas. Menanggapi hal itu, perwakilan dari Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Dadang berjanji akan segera membicarakannya dengan pihak Kementerian Perhubungan serta dengan pihak Garuda Indonesia, untuk menambah armada penerbangan tujuan NTB.

“Setelah Pimpinan DPR membicarakan hal ini kepada Presiden atau pihak pemerintah. Tentu akan diketahui penyebab pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian pembangunan kawasan wisata itu. Dan kami berharap agar proyek yang sejatinya sudah lama ini dapat segera terselesaikan mengingat saat ini pariwisata di NTB menjadi penggerak ekonomi masyarakat NTB, mengalahkan sektor tambang,” pungkas Syafrudin. (Ayu)/foto:andri/parle/iw

PUNAKAWAN BERIKAN MASUKAN DAN KRITIK PADA DPR

Perkumpulan yang menamakan dirinya Punakawan memberi banyak masukan dan kritik tajam terhadap masalah-masalah aktual berbangsa saat ini, baik di bidang hukum, politik, dan ekonomi. Pemerintah dan DPR menjadi sasaran kritik, termasuk kritik terhadap rencana proyek pembangunan di DPR.

Perkumpulan Punakawan yang terdiri dari para ekonom, ahli hukum, pengamat politik, dan rohaniawan diterima langsung Ketua DPR RI Setya Novanto di Ruang Delegasi DPR, Kamis (27/8). Hadir mendampingi Novanto, dua Wakil Ketua DPR, yaitu Fadli Zon

dan Agus Hermanto. Hadir pula Ketua BURT DPR Roem Kono.

Sementara Perkumpulan Punakawan yang dipimpin Jaya Suprana ini di antaranya terdiri dari J. Cristiadi, Mahmud MD, Adhyaksa Daud, Emil Salim, Sri Edi Swasono, Christianto Wibisono, HS. Dillon, Musdah Mulia, Romo Benny, dan Romo Sandyawan. Hadir pula perwakilan korban penggusuran Kampung Pulo dalam pertemuan tersebut.

Musdah Mulia aktivis perempuan menyatakan, indeks demokrasi Indonesia saat ini mengalami penurunan, karena masih bersifat prosedural tidak sub-

stansial. Dan yang membuat demokrasi ini buruk, tentu tidak lepas dari peran partai politik dan DPR. Emil Salim dalam pertemuan tersebut justru mengkritik rencana tujuh proyek pembangunan DPR. Menurutnya, saat ini masih ada yang terlalu urgen untuk mendapat anggaran pembangunan.

Alokasi anggaran yang disusun, katanya, harus punya prioritas. Dan DPR diharapkan agar menunda dulu rencana proyek pembangunan tersebut, karena saat yang sama negara sedang mengalami krisis yang sangat mengkhawatirkan. Romo Benny juga me-



Pimpinan DPR saat menerima delegasi perkumpulan Punakawan

nyampaikan hal yang sama, agar DPR berkorban menunda proyek pembangunan fisiknya untuk mengutamakan pembangunan yang lebih urgen.

Sementara itu, Sri Edi Swasono menyampaikan pandangannya bahwa saat ini Indonesia dikuasai daulat pasar, bukan daulat rakyat. Ketika pasar berdaulat, maka orang miskin selalu jadi korban pembangunan. Orang

miskin digusur, bukan kemiskinannya itu sendiri yang digusur. Untuk itulah, ia merefleksikan kembali proklamasi kemerdekaan sebagai pernyataan budaya. Artinya, budaya mampu berdiri sendiri sebagai bangsa dan menjadi tuan di negeri sendiri.

Ketua DPR RI Setya Novanto di akhir pertemuan mengapresiasi atas semua masukan dan kritik yang dilontarkan

Punakawan. “Ini menjadi masukan untuk kami perhatikan betul di DPR.” Menanggapi kritik terhadap pembangunan gedung DPR, ia menyatakan sudah mengevaluasi agenda proyek tersebut. Proyek ini berjangka panjang. Tidak dibangun dalam waktu dekat ini. Fadli Zon juga mengatakan, akan menyesuaikan anggarannya dengan kondisi yang ada. (mh) foto: andi/parle/hr

Pemerintah Tanggapi Pandangan Fraksi Atas RAPBN 2016



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto berjabat tangan dengan Menkeu

Rapat Paripurna yang berlangsung Selasa (25/08/15), mendengarkan tanggapan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang digelar di Nusantara II Gedung DPR Senayan Jakarta.

Tanggapan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang mewakili Pemerintah, terkait dengan pandangan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Selanjutnya, RAPBN yang bernilai Rp2.121 triliun tersebut siap dibahas lebih rinci pada tingkat selanjutnya, hingga akhirnya nanti ditetapkan sebagai undang-undang APBN 2016.

“Setelah mendengarkan tanggapan dari pemerintah, maka RAPBN akan dibahas pada tingkat selanjutnya,” ungkap pimpinan Sidang Taufik Kurniawan dalam Sidang Paripurna, di Gedung DPR/MPR.

Dalam pidatonya dihadapan anggota Dewan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan ada lima poin utama yang menjadi fokus dalam APBN tahun depan.

Pertama meningkatkan anggaran transfer ke daerah secara signifikan, sehingga untuk pertama kalinya dalam APBN, total anggaran transfer ke daerah dana desa Rp 782,2 triliun. Lebih besar dari anggaran Kementerian dan Lembaga pemerintah pusat yang sebesar Rp780,4 triliun.

Kedua, pengalihan belanja yang kurang produktif dan

tidak tepat sasaran seperti subsidi listrik ke belanja yang lebih produktif melalui peningkatan belanja infrastruktur, pertanian, perikanan dan pariwisata.

Ketiga, pemenuhan anggaran kesehatan 5% dari APBN yang untuk pertama kalinya diwujudkan di tahun 2016 sebagai komitmen pemerintah sesuai amanah UU.

Keempat, memperkuat dan memperluas program perlindungan sosial ke masyarakat yang kurang mampu, dengan menambah, penerima bantuan tunai bersyarat dari 3,5 juta keluarga sangat miskin menjadi 6 juta keluarga.

Kelima, memperluas program kredit usaha rakyat untuk mendukung kegiatan usaha menengah kecil dan mikro melalui peningkatan anggaran.

Kemudian dalam komponen asumsi makro, target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN tahun 2016 sebesar 5,5% berada pada batas bawah rentang pertumbuhan ekonomi, sesuai kesepakatan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN yaitu 5,5 sampai 6%.

Terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah dan BI tidak pernah berdiam diri. Apa yang terjadi dengan rupiah, seperti yang dihadapi juga oleh mata uang negara lainnya terhadap dolar AS.

“Gejala global yang terjadi 1-2 tahun yang lalu tersebut terkait rencana langkah lanjutan normalisasi kebijakan moneter di AS, yang kemudian diperparah pada beberapa waktu terakhir dengan kebijakan devaluasi Yuan Tiongkok,” tegas Bambang.

Stabilitas nilai tukar rupiah perlu dijaga agar tidak berdampak lebih luas terhadap aspek perekonomian nasional. Dalam RAPBN 2016 diperkirakan rata-rata nilai tukar rupiah akan mencapai Rp 13.400 per USD.

“Kondisi aktual yang terjadi saat ini di pasar mata uang nasional dan global, pasti akan diperhitungkan pemerintah, BI dan DPR dalam pembahasan RAPBN 2016. Selain itu, penetapan asumsi akan memperhitungkan langkah-langkah antisipatif dan perbaikan yang telah dan akan dilakukan,” tutur Menkeu.

Penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.565,8 triliun atau meningkat hanya 5% dari target tahun ini. Target ini cukup wajar dengan mempertimbangkan perlambatan perekonomian di 2015 dan 2016 serta langkah-langkah eks-tensifikasi dan intensifikasi perpajakan yang akan terus dilakukan pemerintah. Untuk belanja pemerintah, khususnya infrastruktur akan menuju kepada kebutuhan masyarakat

seperti infrastruktur pertanian, perumahan, air minum dan sanitasi.

Direncanakan akan dibangun 375,9 Km jalan, 6.283,9 m jembatan, perbaikan jaringan irigasi dan optimasi air seluas 500.000 ha, selain pembangunan infrastruktur, lainnya se-

cara menyeluruh.

Terkait rencana penarikan utang, terutama utang luar negeri, mulai tahun 2016 penarikan pinjaman luar negeri neto di APBN direncanakan kembali positif. (as)/foto:andri/parle/jiw.

PIMPINAN DPR GELAR PERTEMUAN DENGAN KEJAGUNG



Pimpinan DPR didampingi Pimpinan Komisi III, menerima Jaksa Agung

Pimpinan DPR dan Pimpinan Komisi III DPR menerima Kejaksaan Agung RI, terkait dengan adanya surat-surat masuk dan berkaitan pembahasan beberapa RUU. Kejaksaan Agung diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan mencari jalan yang terbaik untuk kepentingan Indonesia ke depan.

“Menindaklanjuti Rapat Konsultasi Pimpinan dengan Presiden RI di Istana Bogor ingin situasi Indonesia dapat

berjalan baik, ingin juga masukan dari Kejaksaan Agung,”kata Ketua DPR RI Setya Novanto, Jumát pagi (21/8), di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan diskusi di Istana Bogor antara DPR dan Presiden, yang dihadiri juga Jaksa Agung, dari tema diskusinya adalah keprihatinan, karena dalam kenyataannya Pemerintah menghadapi problem dalam mengakselerasi proses

pembangunan.

Oleh sebab itu, Presiden yang dinilai sangat konsen dan perhatian dengan adanya keluhan di bawah seperti para pelaksana pembangunan, kuasa pengguna anggaran, pengusaha dan mereka yang terlibat langsung dalam pembangunan merasa ada hambatan. “DPR juga banyak menerima surat masuk terkait tema-tema tersebut, oleh karena itu DPR menginginkan adanya kepastian hukum,” tutur Fahri.

Pertemuan ini juga berkaitan dengan proses legislasi, karena DPR dan Pemerintah harus menyelesaikan tugas perubahan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHPA). Selain itu, terkait dengan Revisi UU tentang Kepolisian dan Revisi tentang KPK, DPR dan Pemerintah harus bersikap.

“Revisi UU tentang KPK juga masuk dalam Prolegnas namun belum ada kejelasan nasib. Kejaksaan Agung diharapkan juga konsen terhadap masalah ini,” tegas Fahri. (as), foto : denus/parle/hr

Bambang Sutrisno Dilantik Jadi Anggota DPR/MPR

Usai pembacaan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas RUU tentang APBN (anggaran pendapatan belanja nasional) Tahun Anggaran 2016 beserta Nota Keuangannya, Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (25/8) dilanjutkan dengan Pelantikan Anggota DPR RI sisa Masa Bhakti Tahun 2014-2019.

Sesuai dengan Kepres 68/8 tahun 2015 tentang peresmian anggota DPR/MPR, serta UU No.42 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) khususnya pasal 77, serta Tata Tertib DPR, dimana anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR.

Berdasarkan aturan tersebut, maka Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali memandu pengambilan sumpah atau janji Bambang Sutrisno, yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar Daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI.

Senyum Bambang terlihat usai pengucapan sumpahnya.



Pelantikan anggota DPR Bambang Sutrisno

Ia bertekad akan menjalankan segala janji dan kepercayaan yang sudah diamanahkan masyarakat yang berada di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang.

Lebih lanjut Bambang pun berharap bisa membawa perubahan bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Dapilnya, Jawa Tengah VI. (Ayu)/foto:andri/parle/hr



Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq berharap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) harus mendapatkan sertifikat dari badan pengelola dan penyelenggara ibadah haji dan umrah. Mengingat selama ini menurut Maman, tidak sedikit KBIH yang nakal dalam menjalankan bisnisnya.

“Selama ini tidak sedikit ditemukan KBIH yang nakal, misalnya kerap meminta sejumlah dana dengan alasan yang tidak jelas, misalnya ‘urunan’ membeli laptop dan sebagainya,” ungkap Maman yang disampaikan dalam RDP dengan ormas (Persis dan PP Muhammadiyah), Rabu (26/8).

Pada, ditambahkan Politisi dari Fraksi PKB ini, KBIH sangat berperan dalam meningkatkan kualitas jemaah haji, yakni melalui manasik haji yang diadakannya. Manasik haji yang tidak hanya sekedar seremonial semata, me-

Komisi VIII Harapkan Ada Sertifikasi KBIH dan Pembimbing Haji

lainkan juga pelajaran tentang rukun haji serta tata cara dalam ibadah haji.

Menanggapi hal itu, perwakilan dari Persis (Persatuan Islam), M Faisal Nursyamsi mengatakan bahwa sejatinya sertifikat untuk KBIH sudah ada dan dikeluarkan oleh Kementerian agama, yang diperbarui setiap 3-4 tahun sekali.

Namun pada prakteknya, tidak sedikit organisasi masyarakat (ormas) bahkan individu yang berperan sebagai KBIH. Sehingga tak heran jika kerap terdengar adanya berbagai permasalahan yang dilakukan oleh KBIH. Karena tidak ada sanksi yang ditujukan bagi KBIH tersebut, membuat praktek seperti itu terus terulang dari tahun ke tahun. Oleh karena itu ia berharap ke depan dalam RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga dapat mengatur hal-hal yang terkait dengan KBIH.

Tidak hanya itu, Faisal juga sempat melihat kualitas pembimbing dari Kementerian agama yang masih sangat

minim. Selain kurang memiliki pengetahuan tentang haji, pembimbing Kemenag juga terkadang belum mengetahui lapangan.

“Jika pun pembimbing dari Kemenag itu telah berpengalaman dan mengetahui tentang tata cara dan rukun haji, namun rasio antara pembimbing dan jemaah hajinya sangat tidak seimbang. Hal ini tentu juga harus menjadi perhatian badan pengelola dan penyelenggara ibadah haji dan umrah yang kelak akan dibentuk,” papar Faisal.

Melihat kenyataan itu, Maman yang diamini anggota Komisi VIII lainnya yang hadir di ruang rapat tersebut sependapat jika selain KBIH, badan atau lembaga yang akan mengelola dan menyelenggarakan ibadah haji kelak juga harus memberikan sertifikasi kepada pembimbing. Dengan demikian calon jemaah haji akan terlayani dengan baik. (Ayu) foto: naefuroji/parle/hr

Komisi IV dan Mentan Bahas Kekeringan dan Daging

Komisi IV DPR RI (bidang pangan dan pertanian) menyoroti beberapa permasalahan berkaitan dengan dampak kekeringan yang terjadi saat ini, serta kelangkaan dan mahalnya daging sapi dan ayam.

Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan serta solusi akibat kemarau panjang yang menyebabkan terjadinya kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia, serta kelangkaan dan tingginya harga daging sapi dan ayam di masyarakat. Menurut Wakil Ketua Komisi Herman Khaeron, seluas 300 ribu hektar lahan pertanian mengalami kekeringan, dimana 40 ribu hektar diantaranya mengalami puso.

“Kami (Komisi IV) ingin mendapatkan penjelasan sejauhmana langkah yang sudah diambil oleh Kementerian Pertanian dalam mengantisipasi permasalahan ini,” kata



Suasana Raker Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Herman Khaeron, saat memimpin Raker, Kamis (27/8/2015), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Komisi IV mengingatkan kepada Pemerintah, dalam

waktu dekat, masyarakat akan merayakan dua hari raya keagamaan dan Tahun Baru, dan tentu akan meningkatkan konsumsi pangan.

“Pemenuhan kebutuhan pangan yang aman dan terjangkau kepada masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah,” tegasnya.

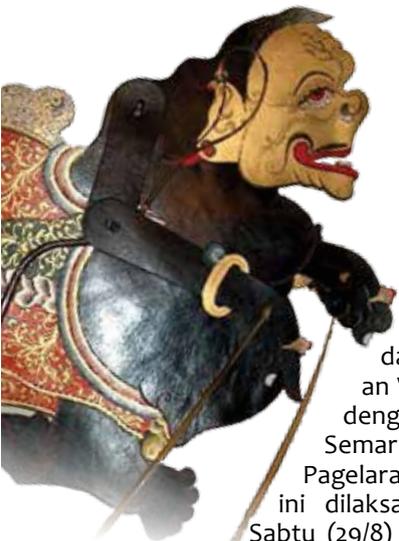
Selain itu, Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan serta tindak lanjut terkait dengan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 berdasarkan hasil pemeriksaan semester II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diantaranya dana bantuan yang tidak digunakan dan mengendap di Kelompok Tani produk pangan kedelai sebesar Rp4,3 miliar, ketidaktertiban dan ketidaktertiban dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Program Gernas Kakao yang mengakibatkan potensi terjadinya kerugian negara dengan

adanya selisih data realisasi penyaluran benih kakao SE sebanyak 548.691 batang senilai Rp3,8 miliar.

Lebih lanjut, Laporan BPK itu menyebutkan, adanya pemborosan terhadap penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di dalam Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 66 yang mengakibatkan pemborosan keuangan Negara Rp12,7 miliar, penyaluran benih kakao SE sebanyak 9,4 juta batang senilai Rp49,5 miliar tanpa disertifikasi/sertifikat telah kedaluarsa, adanya pelaksanaan pekerjaan pembesaran benih kakao SE sebanyak 1,2 juta batang yang disubkontraskan ke Puslitko mengakibatkan potensi kerugian Negara sebesar Rp1,8 miliar.

“Komisi IV juga ingin mendapatkan penjelasan secara detail berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014,” tuturnya. (as) foto: rizka/parle/hr

Sambut HUT-70, DPR Adakan Pagelaran Wayang Kulit



Dalam rangkaian acara Peringatan HUT-70, DPR mengadakan pagelaran Wayang Kulit dengan lakon Semar Pepeling.

Pagelaran wayang ini dilaksanakan pada Sabtu (29/8) di Lapangan Sepak Bola Komplek Parlemen Senayan dengan dalang Ki Enthus Susmono yang juga menjabat Bupati Tegal, Jawa Tengah.

Serangkaian acara dilakukan dalam menyambut HUT RI dan HUT DPR ke-

70 bertema Pesta Rakyat, diantaranya lomba panjat 70 batang bambu, donor darah, lomba mewarnai gambar anak-anak, pameran filateli dan pameran seni dan kebudayaan serta pameran foto wartawan ‘Warna Warni Parlemen’.

Lakon “Semar Pepeling” yang akan disajikan dalam pagelaran wayang kali ini, sesuai dengan kondisi bangsa yang tengah dihadapi sekarang ini. Cerita singkatnya, di negara Yawastina, Prabu Parikesit sedang dihadap para nayaka menerima kedatangan Ki Lurah Semar.

Sebagai Wakil Rakyat, Semar merasa prihatin melihat situasi negara, ekonomi makin merosot, rakyat semakin miskin, banyak pengangguran, kerusakan, begal dimana-mana dan kehidu-

pan rakyat semakin tidak nyaman.

Kemudian Semar mengingatkan atau memberi *pepeling* kepada Prabu Parikesit supaya segera mengambil tindakan, kalau perlu mengganti para pejabat yang tidak mampu menjalankan tugasnya. Tak lama kemudian, datanglah prajurit yang melaporkan terjadinya kerusakan yang dilakukan prajurit Prabu Niradha Kawaca. Prabu Parikesit segera mengutus Raden Sasikirana untuk mengamankan situasi negara.

Di Pesanggrahan Jalawasesa, Prabu Niradha Kawaca berusaha untuk menolong negara Yawastina. Namun usaha tersebut dapat digagalkan para prajurit Yawastina di bawah pimpinan Raden Sasikirana anak Gatotkaca. (mp)

PEMERINTAH KURANG SERIUS ANTISIPASI MELEMAHNYA RUPIAH

Pemerintah dinilai kurang serius dalam mengantisipasi melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Termasuk dalam menghadapi pelambatan pertumbuhan ekonomi global. Demikian ditegaskan Anggota Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid, saat rapat kerja dengan perwakilan Pemerintah, di Gedung Nusantara II, Rabu (26/08/15).

“Pemerintah kurang antisipasi dan telat berpikir. Sekarang kurs rupiah ter-

hadap dolar AS sudah Rp 14 ribu lebih. Ini ibarat sakit sudah sampai leher, kita sudah tidak dalam upaya bagaimana mengantisipasi. Termasuk dalam menghadapi ekonomi dunia. Padahal DPR sudah memberikan dorongan,” tegas Jazilul.

Politisi F-PKB ini juga heran dengan sikap Pemerintah yang tidak terpikir dan memprediksi devaluasi Yuan yang dilakukan oleh China. Karena sekarang kondisinya sudah terlanjur parah,



Anggota Banggar DPR Jazilul Fawaid

Pemerintah diharapkan segera mencari solusi terhadap permasalahan ini.

“Saya berharap kepada pemerintah selalu mengantisipasi, jangan menunggu sampai parah dan bahaya. Sekarang bukan langkah antisipasi lagi, tetapi darurat. Apapun pemerintah harus lakukan, kumpulkan para pengusaha nasional kita. Ajak mereka bersama – sama untuk menyelamatkan keadaan,” saran Jazilul.

Politisi asal Dapil Jawa Timur X juga menyoroti dana transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp782,2 triliun. Angka ini lebih besar dari besaran belanja Pemerintah Pusat. Ia berharap

kepada Pemerintah, dana ini dipastikan sampai ke daerah.

“Jika dana segera sampai ke daerah, maka ekonomi bergerak di daerah. Masalahnya, apakah kemampuan Pemerintah untuk menyerap anggaran dan melaksanakan anggaran yang menjadi persoalan. Bisa saja DPR dan Pemerintah Pusat mengarahkan kepada daerah, tetapi daerah punya kemampuan melaksanakan atau tidak,” kata Jazilul.

Ia menilai, jika daerah tidak mempunyai kemampuan melaksanakan anggaran, maka banyak anggaran yang mengendap di bank-bank daerah, seperti yang banyak terjadi sekarang.

Sehingga, harapan Pemerintah ingin mempercepat pemerataan pembangunan, malah menjadi lambat. Walaupun Pemerintah sudah mengeluarkan terobosan, jika SDM tidak memadai, maka tidak akan mengalami perubahan.

“Prinsipnya, soal dana transfer ke daerah, DPR sangat mendukung, karena akan mempercepat anggaran itu berputar di daerah dan bertumbuh di daerah tersebut. Yang menjadi catatan yaitu siap atau tidak daerah tersebut,” kata wakil rakyat yang juga duduk di Komisi V ini sembari menutup perbincangan. (sf) foto: andri/parle/hr

Wakil Presiden India Akan Berkunjung ke DPR



Sekjen DPR Winantuningtyastiti menerima Pejabat Kedubes India

Wakil Presiden India Mohammad Hamid Ansari berencana melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 12-15 September 2015 mendatang. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Wapres India akan bertemu dengan Wakil Presiden

RI Jusuf Kalla, dan dengan Pimpinan DPR RI. Selain itu, juga akan mengunjungi Bali.

“Kedatangan Deputy Chief Of Mission (DCM) Mr. Manish dari Kedutaan Besar India untuk Indonesia ke DPR dalam rangka menyampaikan rencana kunjungan Wakil Presiden India Mohammad Hamid Ansari ke Indonesia,” ungkap Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti usai menerima utusan dari kedutaan India, Rabu (26/08/2015).

Sekjen DPR Winantuningtyastiti atau akrab disapa Win menyampaikan bahwa kunjungan Wakil Presiden India ke Indonesia adalah tamu negara atau tamu istana. Namun, Wapres India meminta waktu untuk bertemu dengan Ketua DPR RI dan jika dimungkinkan Ketua DPR dapat mengundang juga Ketua DPD dan Ketua MPR.

“Saya akan menyampaikan kepada Ketua DPR perihal rencana kunjungan ini, mudah-mudahan tidak berbenturan dengan jadwal yang lain, mengingat jadwal yang mereka minta tidak ada hari lain kecuali pada hari itu tanggal 14 September 2015, sedangkan Ketua DPR juga banyak menerima tamu negara lainnya,” imbuh Win. (skr) foto: denus/parle/hr

PANJA RUU PERTANAHAN TERIMA MASUKAN PAKAR AGRARIA

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan menerima masukan dari berbagai pakar agraria terhadap draft RUU dan naskah akdemis RUU Pertanahan yang saat ini sedang disusun oleh Komisi II DPR.

Menurut Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Univ. Hasanuddin, Makassar, Prof. Dr. Farida Patittingi, menjelaskan, secara umum RUU Pertanahan ini sudah memuat secara komprehensif hal-hal yang terkait dengan pertanahan, khu-



Panja Pertanahan Komisi II DPR

susnya perluasan hak-hak atas tanah yang berkaitan dengan penggunaan ruang di atas dan di bawah tanah yang membutuhkan pengaturan termasuk pembentukan kelembagaan hak tersendiri, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 RUU Pertanahan ini.

“Namun kelembagaan yang diusulkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat 4 belum mencakup penggunaan ruang di atas tanah yang terpisah dengan penggunaan tanahnya dan atau berbeda subjek haknya sehingga perlu ditambahkan kelembagaan hak tersebut,” jelas Farida.

Ia menambahkan, dalam RUU ini juga secara tegas RUU telah mengatur tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat atas tanah yang selama ini dirindukan oleh Masyarakat Hukum Adat agar ada kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi mereka.

Pengadilan Pertanahan juga diatur dalam RUU ini, oleh karena itu, menurut Farida, dipandang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, mengingat sengketa pertanahan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, oleh karena itu, jelas Farida, keberadaan Pengadilan Pertanahan bisa diatur lebih tegas dan lebih mengutamakan penyelesaian secara mediasi atau musyawarah sebelum masuk ke pokok perkara.

“Jadi fungsi Pengadilan Pertanahan ini lebih diutamakan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan secara musyawarah yang dilakukan oleh hakim dan keputusannya ditetapkan sebagai keputusan yang mengikat, sehingga selaras dengan ketentuan Pasal 59 ayat 1 RUU Pertanahan ini,” tegas Farida.

Sementara itu, Bernhard Limbong pada kesempatan RDPU ini mempertanyakan, tentang bagaimana status Undang-Undang Pokok Agrari (UUPA) dengan adanya RUU Pertanahan ini, serta apakah UUPA masih sebagai UU payung bidang

agrarian nasional.

Selanjutnya ia juga memberi masukan, diantaranya nilai-nilai fundamental atau Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 harus secara utuh menjadi pijakan dan acuan utama dalam RUU ini, serta paradigma demokratis dan penghormatan HAM perlu masuk dalam BAB II tentang ASAS, juga pendekatan hukum harus sejalan seiring dengan pendekatan kesejahteraan.

Mengenai kompensasi atau ganti rugi, ia memberikan masukan, secara prinsip dalam RUU ini, kesejahteraan pemegang hak atas tanah dijamin lebih baik dari sebelumnya, “Karena itu, aspek ganti rugi baik fisik dan non fisik perlu masuk dalam RUU Pertanahan ini guna menyempurnakan UU No.2 tahun 2015, dan rekomendasinya adalah perlu diterbitkan UU Kompensasi atau Ganti Rugi,” terang Bernhard.

Selain itu, tambahnya, untuk mengatasi pembebasan lahan, perlu diatur kelembagaan Bank tanah dalam RUU ini dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah.

“Ada dua alasan utama, yaitu pembangunan terhambat pembebasan tanah dan kegiatan pengadaan tanah selalu menimbulkan konflik,” tegasnya.

Bernhard menguraikan, bahwa tujuan dan manfaat dari Bank tanah adalah pemerintah memiliki stok tanah, efisiensi anggaran APBN/APBD, mengendalikan harga tanah, mengembangkan wilayah perkotaan dan ekonomi wilayah, reforma agrarian dan modernisasi desa, serta ketahanan pangan dan penyediaan perumahan rakyat.

Bank Tanah, terang Bernhard, berfungsi sebagai penghimpun, pengaman, pengendali penguasaan, penilai, dan penyalur tanah, “Sumber pembiayaan Bank Tanah dari APBN/APBD, Bank BUMN dan Swasta, Pajak Properti, Lembaga donor dan lembaga keuangan internasional, serta kerja sama bilateral dan multilateral,” jelasnya. (nt)foto: rizka/parle/hr

PEMERINTAH DIMINTA OPTIMIS TINGKATKAN TARGET LIFTING MIGAS



Anggota Komisi VII DPR Totok Daryanto

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Totok Daryanto menilai, pemerintah harus lebih optimis dalam meningkatkan target *lifting* migas. Karena pada tahun 2016 Blok Cepu akan mulai

berproduksi penuh.

“Exxon memang diprediksi bila produksi mestinya bisa nambah *lifting* mencapai 100.000 barel. Apa angka ini tidak bisa ditambah?” tanya Totok saat Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi di Gedung Nusantara I, Rabu, (26/8).

Komisi VII DPR dan pemerintah yang diwakili Kementerian ESDM menyepakati produksi minyak nasional tahun depan mencapai 830.000 barel per hari, dan gas bumi sebanyak 6.470 mmscfd. Pemerintah menurunkan target produksi gas bumi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBN) menjadi 6.470 juta kaki kubik per hari (mmscfd) atau 1.135.000 barel setara minyak per hari (boepd). seperti diketahui, jumlah ini turun 5,7% dibandingkan target tahun ini.

Pada kesempatan itu, Amien Sunaryadi menjelaskan, perhitungan angka 830 ribu barel perhari sudah termasuk hitungan penambahan *lifting* dari blok Cepu. “Ditambah dengan Cepu, serta realisasi 756 ribu barel per hari, produksi kita maksimal sudah menjadi 812 ribu barel per hari. Saya lihat angka 830 ribu itu realistis berdasarkan hasil diskusi sementara 42 dari 83 KKKS,” terang Amien.

Target *lifting* minyak bumi naik tipis dari APBN-P 2015 825 ribu barel perhari dengan realisasi 756 ribu barel per hari menjadi 830 ribu barel per hari di tahun 2016. Sementara *lifting* Gas Bumi APBN 2016 ditargetkan 1.155 ribu BOEPD. Jumlah tersebut turun 5,7% dari target tahun sebelumnya 1.221 ribu BOEPD dengan realisasi 1.180 BOEPD. (Si) foto: andri/parle/hr

Sidak Komisi VIII Ke Kemenag Temukan Kendala Utama Keterlambatan Visa Haji



Tim Komisi VIII DPR, dipimpin Ketuanya Saleh P. Daulay sidak ke Kemenag

Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama Republik Indonesia selama ternyata belum terintegrasi dengan sistem E-Hajj yang dibangun Pemerintah Arab Saudi. Hal tersebut menjadi temuan Komisi VIII DPR RI saat melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke Gedung Dirjen Penyelenggara haji dan Umrah, Kementerian Agama, Lapangan Banteng Jakarta, Rabu (26/8).

“Kedatangan kami ke Kantor Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama ini sebenarnya untuk memastikan apakah pernyataan Kementerian agama bahwa permasalahan keterlambatan visa calon jemaah haji sudah teratasi dengan baik. Dan ternyata setelah kami datang langsung ke sini (gedung Siskohat Kemenag RI), menurut pengakuan petugas bahwa masih ada sekitar 1.111 visa calon jemaah haji yang belum selesai. Terus terang kami prihatin sekaligus kecewa dengan semua ini,” jelas Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay yang memimpin Sidak.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung ke lapangan itu, Komisi VIII menemukan kendala utama yang menyebabkan terjadinya keterlambatan keluarnya visa calon jemaah haji

Indonesia, yakni Siskohat yang dimiliki Kemenag RI selama ini belum terintegrasinya atau belum terhubungnya dengan sistem E-Hajj pemerintah Arab Saudi. Siskohat yang dimiliki Kemenag RI selama ini masih belum siap alias masih harus disempurnakan lagi.

“Siskohat yang dimiliki Kemenag RI masih harus disempurnakan lagi, antara lain menurut pengakuan mereka belum terkoneksi antara data yang ada disini dengan sistem di Arab Saudi. Dan setelah ada kasus visa bermasalah, Kemenag RI kemudian minta dispensasi kepada pemerintah Arab Saudi, sehingga diberikanlah dispensasi itu dengan menggunakan sistem pendataan yang dilakukan secara manual. Dan masalah sekitar 10 ribu visa setiap harinya. Namun cara manual ini kemudian dihentikan kembali, sehingga terjadi keterlambatan visa itu,” tambah Wakil ketua Komisi VIII, Sodik Mudjahid.

Dari sana, Tim Sidak Komisi VIII yang terdiri dari Saleh P Daulay, Sodik Mudjahid, Muhammad Syafi’i, Maman Imanul Haq, Khatibul Umam Wiranu, Endang Maria Astuti, Kuswiyanto, Lalu Gede Syamsul Mujahidin, Khoirul Muna, M. Nur Purnamasidi, An’im Mahrus, dan Abdul Malik Haramain ini menilai bahwa keterlambatan Visa calon jemaah Haji yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia ini bukan disebabkan karena sistem E-Hajj pemerintah Arab Saudi, melainkan Siskohat Kemenag RI sendiri yang belum siap beroperasi secara sempurna. Justru pemerintah Arab Saudi telah memberikan kemudahan kepada Indonesia dimana E-Hajj ini tidak harus diterapkan secara penuh, jadi seharusnya ada percepatan pengurusan visa.

Kedepan Komisi VIII berharap agar Siskohat dapat disempurnakan lagi, dan jika ada permasalahan terkait lambannya visa calon jemaah haji, dapat segera diselesaikan dengan baik. Sebagaimana diketahui, Menteri Agama telah menyetujui untuk menjadi *pilot project* (proyek uji coba) E-Hajj Arab Saudi, sehingga sejatinya Siskohat yang dimiliki oleh Kemenag pun harus sudah lebih siap dan sempurna. (Ayu) foto: [naefuroji/parle/ray](#)

ANGGARAN KASUR WAJAR, ASAL TIDAK ADA KORUPSI DAN MARK-UP

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono menegaskan, para anggota DPR adalah pejabat negara. Sebagai pejabat negara, menteri-menteri itu juga rumah dinasnya diperbaiki termasuk penggantian kasur.

“Jadi saya kira itu wajar-wajar saja. Yang penting jangan ada korupsi, *mark-up*, jangan ada kolusi yang dibangun.

Dan itu menjadi domain kesekjenan,” katanya di Jakarta, Selasa (25/8). Politisi FPG mengemukakan hal itu menanggapi adanya pemberitaan pengadaan kasur untuk anggota Dewan mencapai Rp 12,5 miliar Sebelumnya, Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dan Sekjen DPR



Ketua BURT DPR Roem Kono



untuk segera membatalkan lelang kasur atau pengadaan *spring bed* senilai Rp 12,5 miliar. Di tengah perekonomian yang memburuk saat ini tak layak anggota DPR menghambur-hambur uang negara dan memperlihatkan kemewahan DPR di depan publik.

Menurut Roem Kono, anggaran sebesar itu wajar sebab jumlah anggota DPR saja 560 orang, kemudian

setiap rumah berapa kasur yang diperlukan. Belum lagi ada Wisma Kopo yang juga memerlukan perlengkapan rumah tangga termasuk tempat tidur berikut kasurnya.

“Jangan hanya dilihat kasurnya saja, mungkin aksesoris lain sehingga anggarannya memang mencapai miliaran rupiah. Janganlah masalah ini dibesarkan,” tegasnya.

Saat ditanya apakah BURT ikut membahas anggaran kasur ini, politisi asal Gorontalo ini mengatakan, hanya membahas globalnya saja bahwa perlu ada pemeliharaan rumah. Dan ini sekali lima tahun, dan kasur itu sudah dipakai selama 5 tahun oleh anggota DPR sebelumnya. “Jadi wajar saja, kenapa tidak. Masak kita harus bawa kasur sendiri,” pungkask dia. (mp)foto: rizka/parle/hr

CALHAJ PERLU ANTISIPASI CUACA EKSTREM DAN VIRUS MERS

Para jamaah haji Indonesia harus menyadari bahwa ada dua kondisi yang berpengaruh pada kesehatan saat musim haji sekarang ini. Pertama adalah cuaca diatas 44-47 derajat Celsius di Arab Saudi, karena itu tidak boleh secara langsung berpapasan dengan matahari, sebisa mungkin disiapkan pelindung kulit.

Yang kedua wabah Mers, karena virus ini sangat terkait dengan perilaku kita juga karena faktor udara. Karena itu dia apresiasi Kemenag yang menem- patkan 9 titik yang dijadikan posko mengantisipasi gangguan kesehatan.



Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim

Di setiap posko ada 6 dokter terdiri 3 dokter umum dan satu dokter spesialis penyakit dalam dan seorang dokter lspa serta seorang apoteker.

“Jadi sebetulnya sudah sangat baik perencanaan. Mudah-mudahan di tingkat pelaksanaannya akan berhasil baik,” tandas anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim, Rabu (26/8) di Jakarta. Hal itu dikatakannya sehubungan cuaca di Arab Saudi yang mencapai 47 derajat dan adanya virus Mers.

Sebagaimana diberitakan, Arab Saudi Selasa (25/8) mengkonfirmasi adanya tujuh lagi kematian akibat

korona virus Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS) di Riyadh, sehingga jumlah korban jiwa di kerajaan yang kaya minyak itu akibat sindroman ini menjadi 498 orang.

Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengatakan tujuh penularan baru virus itu telah diidentifikasi di Riyadh. Sebelumnya, Kementerian itu mengkonfirmasi 49 orang tertular virus itu dalam satu pekan sampai 22 Agustus. Di Kerajaan itu telah diidentifikasi 1.162 penularan virus ini sejak 2012 lalu.

Saat dikonfirmasi adanya larangan agar para jamaah haji tidak ber-selfi (berfoto) dengan unta, Mustaqim mengatakan ada juga anjuran agar jamaah haji jangan minum susu unta yang belum disterilkan. Itu perlu di- jauhi sebisa mungkin. Selain itu jangan memegang barang-barang yang sebelumnya dipegang orang yang tidak dikenal. “Saya sarankan, begitu ada tanda-tanda sakit seperti flu, maka segera lapor ke petugas kesehatan,” ujarnya mengingatkan. (mp) foto: andri/parle/hr

RUU KEBUDAYAAN KEMBALI DIBAHAS

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisyam menegaskan jika RUU Kebudayaan yang sedang dibahas oleh Panja ini sudah dibahas oleh anggota DPR RI sejak tahun 2007 sampai 2014, namun gagal. Dan, RUU inisiatif DPR RI ini kembali diserahkan ke Baleg DPR RI pada September 2014.

“RUU ini terakhir dibahas pada Juli 2014 lalu tapi kehabisan waktu, dan baru pada September 2014 diserahkan ke Baleg DPR RI dan pada Agustus ini menjadi keputusan sebagai hak inisiatif DPR RI. UU ini diperlukan, karena UU terkait seperti UU Film, UU Cagar Budaya, dan UU Pariwisata belum ada induknya,” tegas Ridwan Hisyam dalam diskusi forum legislasi ‘RUU Kebudayaan’ bersama budayawan Radhar Panca Dahana dan sejarawan UI Bondan Kanumoyoso di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (25/8).

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mem- bu- tuhkan Rp1,5 triliun untuk pengembangan 16 industri kreatif

yang akan dilakukan Badan Ekonomi Kreatif. Hal itu terkait Presiden Jokowi pada tahun 2019 menargetkan pariwisata *leading sector* untuk pendapatan negara tertinggi. “Kalau UU ini berhasil maka devisa negara ditargetkan meningkat, dan pariwisata akan berkembang pesat,” ujar Ridwan.

Menteri Pariwisata Arif Yahya sendiri mengajukan ang- garan Rp4,5 triliun dari sebelumnya Rp2 triliun dengan menargetkan 2 juta turis asing dan 20 juta turis domestik pada tahun 2016. “Jadi, tantangan ke depan perlu UU yang memayungi semua kategori seni, budaya dan pariwisata termasuk film dan industri kreatif lainnya. Thailand dengan film *Cian May*, ternyata menjadi promosi pariwisata di du- nia,” kata Ridwan, politisi dari Partai Golkar ini.

Substansi RUU Kebudayaan merupakan penjabaran UUD NRI 1945 (Pasal 18B, 28,29,32, dan pasal 36), berlandaskan Pancasila dan secara substansi menjangkau kebutuhan dan



Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam dalam Forum Legislasi

perkembangan jaman. Luas Indonesia terdiri dari 5.193.252 Km² yang terdiri dari atas 1.890.754 Km² luas daratan, dan 3.302.498 Km² luas lautan. Luas daratan Indonesia hanya sekitar 1/3 dari luas seluruh Indonesia sedangkan 2/3-nya berupa lautan. “Ini yang harus dijangkau oleh UU Kebudayaan ini,” pungkasnya.

Budayawan Radhan Panca Dhana menjelaskan, pemerintah sejak dulu tidak mau ikut campur tangan dan seniman juga menolak diintervensi.

Yang menjadi pertanyaan kata Radar, siapa yang bisa merumuskan kebudayaan? Ada Candi Borobudur, Prambanan, artefak, dan tempat-tempat bersejarah masa lalu itu merupakan produk kebudayaan, sehingga kebudayaan itu yang memproduksi sesuatu. Sekarang seperti pabrik-pabrik, industri dan era yang melahirkan kita seperti saat ini. “Jadi, tak ada yang bisa merumuskan kebudayaan itu.

Sedangkan peninggalan sejarah itu produksi nenek moyang, bukan kita. Bukan Orde Lama, bukan Orde Baru,” tambahnya.

Soeharto memasung pemikiran dan imajinasi rakyat, maka lahirlah generasi sekarang ini. Bahwa kebudayaan yang buruk akan menghasilkan produk yang juga buruk; birokrasi dengan mental korup: maka dibutuhkan mental, pola-pikir (*mindset*), *spirituality*, *morality*, norma dan setetika, tapi hal itu tak bisa diperbaiki dengan RUU ini.

Karena itu kata Radar, gagasan kebudayaan itu terdiri dari lima yaitu *value* (nilai), norma, *mentality* (moralitas), etika, dan estetika (mempunyai kapabilitas untuk apresiasi produk-produk orang, bangsa lain, kalau tidak, estetikanya rendah. Namun merubah *mindset* itu dibutuhkan minimal 150 tahun.

“Dan, yang bisa merubah lembaga negara adalah tradisi (keluarga) dan agama (pesantren, masjid, ulama, kiai, ustadz, ajengan, teuku) dll. Tapi, ketiganya itu kini macet pada penciptaan budaya. Sebab, kalau penciptaan itu sama dengan kita belajar ke London, AS, Perancis, tapi sepulangnya dari Barat, lupa dengan Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Madura dan lainnya, meski sudah lulus S3,” tuturnya.

Lalu apakah perlindungan terhadap film? “Film itu justru menjadi senjata utama untuk diplomasi kebudayaan. Maka di Barat, film justru *diback up* oleh negara, sehingga berbagai kebutuhan film digratiskan dan bagaimana film Hollywood menjadi tuan rumah di negeri orang, sehingga film Indonesia pun kalau bisa menjadi tamu di negerinya sendiri. “AS berkepentingan film-nya menjadi tuan rumah di seluruh dunia,” jelas Radar. (nt/sc)/foto:andri/parle/iw

GOPAC Yogyakarta Akan Undang KPK Jadi Panelis Diskusi

Konferensi *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC) ke-6 akan mengundang Ketua KPK untuk menjadi panelis dalam Konferensi organisasi parlemen anti korupsi dunia di Yogyakarta pada tanggal 6-8 Oktober.

“Intinya yaitu kita ingin mengajak para legislator, akademisi, NGO, dari seluruh dunia untuk berdiskusi terkait persoalan bagaimana memberantas korupsi, pemulihan aset, maupun kode etik bagi penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab, serta peran perempuan dalam memberantas korupsi, yang tidak kalah pentingnya yaitu diskusi mengenai mahalnya institusi demokrasi,” papar Ketua DPR Setya Novanto, di Gedung Pustakaloka, baru-baru ini.

Selain itu, GOPAC juga akan mengundang berbagai lembaga internasional seperti *Pacific Regional Anti Corruption Adviser for United Nations Office*



Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan sambutan sosialisasi Sidang GOPAC Yogyakarta kepada Dubes Negara sahabat

on Drugs and Crime (UNODC), GOPAC negara tetangga, *Socio Economic Right Accountability Project* (SERAP), COPLA, KPK Indonesia, *Group of States Against Corruption* (GRECO) maupun NDI.

GOPAC Indonesia berdiri pada tahun 2012, dan merupakan cabang dari GOPAC Internasional yang terdiri

dari anggota parlemen yang peduli terhadap pemberantasan korupsi. Ini merupakan suatu lembaga informal yang bertujuan untuk mendorong *grand corruption* sebagai salah satu kejahatan berdasarkan hukum internasional. (Si)/foto:denus/parle/iw



Komisi XI Minta Pemerintah Bentuk *Crisis Center*



Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad

Komisi XI DPR RI melakukan rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia, untuk membahas masalah ekonomi Indonesia yang saat ini mengkhawatirkan, dimana nilai tukar dolar terhadap rupiah semakin tinggi.

“Tadi malam, Komisi XI telah menggelar rapat dengan Bank Indonesia, dan kami meminta BI untuk tetap menjaga dollar agar tidak melambung tinggi terhadap rupiah, dan Bank Indonesia menjelaskan bahwa cadangan devisa masih bagus sebesar 107 dolar, dan BI optimis bahwa selama 7 bulan ke depan masih tetap aman,” jelas Ketua Komisi XI Fadel Muhammad kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (25/08/2015).

Fadel menjelaskan, keadaan ekonomi seperti ini tentu, Bank Indonesia

juga merasa sulit, untuk itu Komisi IX meminta kepada pemerintah untuk membentuk *crisis center*.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan masalah ekonomi ini dengan sangat serius, dan meminta agar dibentuk *crisis center* untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia,” ungkap Fadel.

Fadel menjelaskan, pada rapat kerja dengan Bank Indonesia semalam, Komisi XI juga meminta tiga hal kepada BI, yaitu agar *spending* bisa dipercepat, belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dipercepat, serta hambatan untuk berinvestasi di Indonesia tidak dipersulit.

“Tiga hal yang diminta oleh Komisi XI kepada pemerintah, antara lain, proses belanja pemerintah pusat dan

pemerintah daerah segera dipercepat, *spending* harus dipercepat dan hambatan-hambatan dalam berinvestasi dihapus. Komisi XI juga akan melakukan rapat dengan Menko Perekonomian dan menteri yang terkait dengan bidang ekonomi untuk membicarakan langkah-langkah serta meredam krisis yang sedang bergejolak ini,” imbuh politisi Golkar ini. (as)/foto:naefuroji/parle/hr



Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung

Komisi I DPR RI menerima aspirasi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah bekerja memberikan bantuan kepada etnis Rohingya, kelompok masyarakat dari Myanmar terutama yang berada di pengungsian. Mereka menyampaikan sejumlah masukan sekaligus melaporkan akan mengadakan konferensi internasional LSM tentang Rohingya.

“Iya kita menerima dan mendengar sejumlah masukan, bahan yang kita terima akan kita pelajari. Ada sejumlah permasalahan yang tadi disampaikan, nanti kita akan konfirmasi dengan pemerintah kalau perlu kita panggil menteri luar negeri,” kata Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tanjung usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/15).

Terkait permasalahan pengungsi

Komisi I Terima LSM Peduli Rohingya

politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengakui regulasi yang mengatur hal ini belum memadai. Ia menyambut baik rencana pemerintah yang akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk melengkapi regulasi yang sudah ada.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan masukan agar LSM Indonesia dapat bekerja efektif, termasuk menarik perhatian dunia internasional. Ia menyarankan agar dalam bertugas memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi.

“Banyak permasalahan terkait Rohingya tapi sebaiknya yang diangkat adalah isu kemanusiaan, perempuan dan anak-anak, ini cepat disoroti publik internasional. Jadi strateginya kita ikuti cara berfikir mereka,” tutur dia. Ia berjanji sejumlah data yang disampaikan akan diteruskannya dalam pertemuan parlemen dunia - Inter Parliamentary Union (IPU) dalam waktu dekat.

Sementara itu juru bicara LSM,

Syuhelmaidi Syukur dari KNSR (Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya) menjelaskan kerja sama diantara komponen masyarakat di tanah air dalam membantu Rohingya sudah cukup baik. Kerja sama itu ingin diperluas dengan membentuk komite internasional sekaligus menyiapkan agenda konferensi untuk Rohingya.

Sejauh ini menurutnya sejumlah LSM dan mitra kerja dari beberapa negara diantaranya Jepang, Inggris, Pakistan dan Turki sudah menyampaikan dukungannya. Ia berharap rencana ini juga mendapat dukungan dari pemerintah dan juga DPR.

“Kita siap menjadi tuan rumah, rencananya di Aceh. Kita membangun akses dengan pemerintah, berharap dukungan dalam bentuk kebijakan. Kita ingin memperlihatkan kepada masyarakat dan dunia kita mampu mengelola pengungsi, namun kita perlu menyadari masih banyak saudara dari para pengungsi di kampung halaman yang perlu dibantu,” pungkask dia.

(iky) foto: andri/parle/hr

DPR Apresiasi Setkab dan Setneg Raih WTP

Komisi II DPR memberikan apresiasi kepada Sekretariat Kabinet yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, terkait Laporan Keuangan Tahun 2014. Sedangkan kepada Kementerian Sekretariat Negara yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Komisi II DPR meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk segera menindaklanjuti hal-hal yang menjadi temuan BPK terkait laporan Keuangan Tahun 2014

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman saat Komisi II DPR melakukan Rapat Kerja dengan Mensesneg yang diwakili oleh Sekretaris Kemensetneg Setya Utama, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014, di Jakarta, Senin, (24/8).

Sebelumnya, Seskab Pramono Anung melaporkan, bahwa BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Setkab Tahun 2014 yang terdiri dari Neraca 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 dan Catatan atas Laporan Keuangan.

“Laporan Keuangan merupakan tanggung jawab Setkab, tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan,” jelas Pramono.

Ia menambahkan, sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Setkab Tahun 2014 telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman dan Menteri Seskab Pramono Anung

Neraca Setkab, lanjut Pramono, per 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014, dan Catatan atas Laporan Keuangan, disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga Setkab mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Sementara itu, Sekretaris Kemensetneg Setya Utama berharap pengelolaan keuangan Negara ditahun 2015 dan selanjutnya, Kemensetneg dapat terus melanjutkan strategi penguatan kelembagaan guna mendukung pelaksanaan tugas konstitusional Presiden dan Wapres yang berkualitas.

“Sebagai wujud dari upaya tersebut, kami terus perluas penerapan *e-government* serta beragam aplikasi berbasis teknologi informasi guna mendukung peningkatan produktifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas,” terangnya. (nt) foto:ry/parle/ry



Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis dalam acara Dialektika Demokrasi

Misteri sebab-musabab kecelakaan pesawat di Indonesia sampai saat ini belum terungkap secara benar dan bisa dipertanggungjawabkan dipertanyakan oleh DPR RI. Khususnya hasil Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait temuan isi kotak hitam (black box), yang seharusnya bisa menjawab penyebab kecelakaan

PENGAWASAN BANDARA-BANDARA PAPUA SUPAYA DITINGKATKAN

pesawat ternyata belum terjawab. Ini diduga kuat akibat KNKT masih di bawah Kementerian Perhubungan (Kemhub) RI dan bukannya Presiden RI.

“Dulu ada peraturan presiden tentang struktur KNKT, tapi sampai sekarang ini belum dilantik-lantik. Apakah ini agar KNKT tetap di bawah Kemhub? Maka hasil temuan KNKT dari kotak hitam sampai saat ini tidak bisa diimplementasikan. Karena itu, Komisi V DPR RI akan mempertanyakan kinerja dan pertanggungjawaban dari KNKT itu,” tegas Ketua Komisi V DPR

RI Fary Djemy Prancis dalam dialektika demokrasi ‘Penerbangan Udara Di Papua’ bersama Suharto AM, pakar transportasi udara dari Universitas Trisakti di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (20/8).

Namun demikian DPR RI mengapresiasi Timsar Gabungan, yang telah berhasil mengevakuasi korban kurang dari 48 jam, menemukan kotak hitam, mengidentifikasi, diharapkan KNKT mampu mengungkap penyebab jatuhnya pesawat Trigana Air dan menyelesaikan 9 *manifest* (nama-nama yang

berbeda dengan yang tertera di tiket penerbangan).

Khusus untuk bandara-bandara di Papua, Fary Djemy meminta agar pengawasan dan pengamanannya ditingkatkan secara menyeluruh. Baik dari instrumen, radar, dan sebagainya mengingat tingkat kecelakaan pesawat di Papua tergolong tinggi.

Suharto menyatakan hal yang sama jika Indonesia harus memperkuat penerbangan di dalam negeri atau domestik. Sebab, transportasi udara menjadi tulang punggung dalam perekonomian dan pembangunan. “Khususnya di Papua, agar tidak terjadi ketimpangan, meski perlu juga mempertimbangkan transportasi darat dan laut,” ujarnya.

Mengapa? Dari 245 juta penduduk Indonesia, ternyata yang naik pesawat belum 10 persennya. Asumsinya versi Inaka seseorang baru 7 kali setiap tahunnya naik pesawat. Tapi, yang moderat adalah 4 kali dalam satu tahun. “Indonesia ini potensi besar dan dunia mengincar pasar Indonesia. Apalagi, kelas menengah kita sudah mencapai 120 juta orang (2010) yang pengeluarannya 2 – 10 dolar AS,” tambah Suharto.

Karena itu, kita harus memperkuat transportasi penerbangan domestik dari semua aspek: infrastruktur, SDM, operator, regulator, dan sebagainya baru bisa bersaing dengan dunia internasional. Di Papua sebagai bandara

perintis, seharusnya infrastrukturnya ditingkatkan. Sebab, masih ada landasan yang bolong-bolong, banyak binatang, dan lain-lain.

Menurut Suharto, tingkat kecelakaan pesawat di Indonesia masuk kategori II, sama seperti Nigeria, Ethiopia, Guyana, maka pemerintah harus menyiapkan infrastruktur dan termasuk pilot yang membutuhkan biaya untuk menjadi seorang pilot sebesar Rp 1 miliar. Karena itu, KNKT sesuai dengan UU No.1 tahun 2009 tentang keselamatan penerbangan, KNKT itu harus independen. “Sebab, KNKT itu menjadi indikator dari kinerja Menhub RI,” ungkapnya. (nt/sc), foto : dok.daridulu/parle/hr

DPR Dorong Pembangunan RS Pendidikan



Anggota Komisi X DPR Isma Yatun bersama Tim Kunker Komisi X berdialog dengan siswa SDN Kelapa Tinggi Kupang Tengah, NTT

Anggota Komisi X DPR Isma Yatun akan “menggugurkan bintang” anggaran Rumah Sakit Pendidikan terutama di Universitas Nusa Cendana (Undana) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). “Saya akan berusaha menggugurkan bintang-bintang itu dalam raker dengan Menteri Keuangan. Kalau semua permasalahan termasuk masalah administrasi selesai, mau tidak mau Menkeu harus menggugurkan bintang-bintang

itu,” katanya dalam pertemuan dengan kalangan perguruan tinggi di Undana Kupang belum lama ini.

Rektor Undana Frederick Benu dalam pertemuan dengan Tim Kunker Komisi X dipimpin Wakil Ketua Nuroji memaparkan bahwa Undana sudah merencanakan pembangunan Rumah Sakit (RS) Pendidikan. Pembangunan RS ini sesuai amanat UU bahwa seluruh universitas yang memiliki Program

Studi Kedokteran harus pula memiliki RS Pendidikan.

Menurutnya, pihaknya mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp 50 M dan semua proses sedang berjalan, namun sedikit tertahan karena beberapa mekanisme yang harus dilewati. Bahkan dalam APBN, alokasi dana untuk membangun RS Pendidikan itu masih ada tanda bintang, artinya belum bisa segera direalisasikan atau dicairkan.

“Mudah-mudahan presiden segera mengeluarkan Perpres untuk mempercepat pencairan anggaran (serapan APBN). Dengan keluarnya regulasi itu bisa lebih fleksibel. Kami sebagai panitia sangat hati-hati dan takut menggunakan anggaran ini. Hanya ada aroma KKN saja maka kami bisa ditahan,”

ujarnya.

Isma Yatun yang juga menjadi anggota Badan Anggaran DPR ini berjanji akan segera membahas di intern Komisi X dan siap memperjuangkan anggaran pendidikan di NTT. Di Komisi X DPR, lanjutnya dia, tidak ada beda warna, mau putih, hijau atau merah, kalau untuk

kepentingan bangsa, pasti dikerjakan bersama-sama. “Itu komitmen kami. Mudah-mudahan bintang bisa berguguran sehingga tidak ada lagi yang tertunda, bila dana siap maka segera bisa dilaksanakan pembangunannya,” ia menambahkan. (mp) foto:mp|parle|ry.

DPR DUKUNG BATU MULIA INDONESIA GO INTERNASIONAL



Wakil Ketua DPR Fadli Zon meninjau stand pameran batu mulia di DPR

DPR RI mendukung segenap upaya agar potensi batu mulia Indonesia baik dalam bentuk batu akik maupun jasper, dapat menerobos pangsa pasar di mancanegara. Wakil rakyat perlu mendorong sinergi antara para seniman batu mulia dengan pemerintah menyiapkan regulasi dan strategi

pemasaran yang jitu.

“Kita sangat *men-support* ini go internasional. Menteri Pariwisata dan para seniman yang kreatif harus saling bersinergi. KBRI kita harus ikut membantu memasarkan potensi batu mulia ini di luar negeri, apalagi sekarang pengangguran sedang meningkat

sementara dolar sedang tinggi,” kata anggota Komisi IX DPR, Imam Suroso usai pembukaan pameran di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/15).

Ia mengaku dalam sejumlah kunjungan ke luar negeri banyak pihak memberikan apresiasi kepada perkembangan batu mulia Indonesia. Apalagi khusus untuk jasper yang banyak dipakai sebagai liontin atau batu pajangan karena memiliki motif menarik dan seperti sidik jari, tidak ada duanya.

Ketika ditanya tentang permintaan asosiasi batu mulia jasper agar aturan perundang-undangan terkait eksploitasi dipertegas, Imam mengaku siap mendukungnya. “Iya regulasi diperlukan, saat ini kita sudah punya UU no.4/2009 tentang Mineral dan Batu Baru. Tapi prinsipnya regulasi itu mengatur bukan untuk menghalangi,” tekan wakil rakyat dari dapil Jateng III ini.

Pameran Batu Mulia Jasper Indonesia di Gedung Nusantara dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 24-27 Agustus 2015 ini dilaksanakan bersamaan dengan pameran filateli dan numastika, bagian dari rangkaian peringatan HUT RI dan HUT DPR yang ke-70. (iky) foto: jaka|parle|hr

Pemerintah Harus Kembangkan Sentra Pertanian di Luar Jawa

Pemerintah Indonesia harus mengembangkan sentra pertanian di luar Pulau Jawa, sesuai konsep pembangunan adil dan merata. Pasalnya, selama ini, pengembangan sentra

pertanian hanya terfokus di pulau yang terdiri dari 6 provinsi ini. Daerah sentra pertanian lama, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, NTT, Flores maupun



Ekonom Indef Bustanil Arifin

daerah lainnya, harus diperhatikan, mengingat banyak infrastruktur yang terbengkalai.

Demikian dikatakan Ekonom Senior Indef, Bustanil Arifin, usai menyampaikan materi di diskusi bertema ‘Pembangunan Infrastruktur dan Subsidi Sektor Pertanian, yang digelar oleh Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara, Setjen DPR. Diskusi berlangsung di Ruang Pansus C, Gedung Nusantara II, Jumat (21/08/15).

“Jika ingin adil, Pemerintah juga perlu fokus untuk pengembangan tempat-tempat strategis di luar Pulau Jawa. Dalam jangka panjang, sulit jika hanya mengandalkan kebutuhan pangan dari Jawa saja. Sepertinya mulai diarahkan ke daerah lain, karena walau bagaimanapun mereka juga bagian dari kita,” kata Arifin.

Ketika ditanya apakah RAPBN 2016 sudah memberikan perhatian kepada sektor pertanian, Arifin memastikan Pemerintahan Joko Widodo memberi-

kannya. Namun, yang dibutuhkan sektor pertanian bukan hanya pada besaran anggaran maupun besaran subsidi, namun juga bagaimana alokasinya, dan bagaimana pelaksanaannya.

“Di dalam APBN, yang dilihat hanya besaran subsidi pupuk dan infrastruktur. Justru yang menjadi penting adalah bagaimana anggaran khusus. Dari jumlah, turun menjadi alokasi, setelah itu mampu dilaksanakan atau tidak,” imbuh Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia itu.

Arifin juga mengkritisi fungsi DPR dalam mendukung sektor pertanian. Ia menilai, terkadang DPR menganaktirikan fungsi pengawasan ketika menjalankan fungsi yang lainnya, terutama ketika pembahasan RAPBN. Padahal, di satu sisi, pengawasan terhadap penyerapan anggaran juga perlu ditingkatkan.

“Setelah Presiden menyampaikan RAPBN dan Nota Keuangan pada pertengahan Agustus, Anggota DPR

akan lebih fokus kepada budgeting. Sementara alokasi kegiatan 2016 biasanya terlupakan. Belum lagi fungsi pengawasan untuk memantau penyerapan anggaran pada kuartal tiga dan empat yang sangat krusial, karena akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi secara umum,” kritik Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA itu.

Untuk itu ia berharap, walaupun di kuartal tiga dan empat DPR disibukkan pembahasan anggaran, namun tidak melupakan fungsi pengawasan dan legislasinya.

Diskusi ini diikuti oleh Analis dan Peneliti di lingkungan Setjen DPR, dan Tenaga Ahli, baik di Komisi maupun Anggota Dewan. Sebelumnya, diskusi dibuka oleh Plt. Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara, Mardi Harjo. (sf,ctr,dhi)/foto:naefurodji/parle/iw.

PNBP Melebihi Target, DPR Berikan Apresiasi



Suasana Raker Komisi II DPR dengan Mensesneg

Komisi II DPR memberikan apresiasi terhadap Kementerian Sekretariat Negara atas perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2014 yang melebihi target sebesar 140,37 persen dan meminta agar perolehan PNBP ditahun-tahun berikutnya dapat lebih ditingkatkan.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman saat Komisi II DPR melakukan Rapat Kerja dengan

Mensesneg yang diwakili oleh Sekretaris Kemensetneg Setya Utama, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014, di Jakarta, Senin, (24/8).

Dalam laporannya, dihadapan Raker Komisi II, Sekretaris Kemensetneg Setya Utama menjelaskan, bahwa pada pengelolaan tahun 2014, untuk perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dari estimasi Kemenset-

neg Tahun 2014 yang sebesar Rp. 258 miliar lebih, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dapat tercapai sebesar Rp. 362 miliar lebih. “Capaian tersebut melebihi target sebesar 140,37 persen,” jelas Setya.

Sementara itu, tambah Setya, untuk realisasi belanja Kemensetneg sampai tanggal 31 Desember 2014, terealisasi sebesar Rp.2.003 triliun atau sebesar 85,23 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.350 triliun.

“Realisasi anggaran sebesar 85,23 persen itu antara lain dikarenakan, pertama, kelanjutan kebijakan efisiensi atau penghematan di hampir seluruh kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja di lingkungan Kemensetneg,” jelas Setya.

Kedua, lanjutnya, kegiatan pengadaan barang, jasa dan modal yang nilainya lebih rendah dari anggaran yang telah dialokasikan, ketiga, berakhirnya masa bakti anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada bulan Oktober 2014, yang menyebabkan belanja gaji dan dana operasional dan kegiatan tidak dapat direalisasikan, keempat, adanya penyerapan anggaran pada satker LPSK yang besarnya tergantung pada jumlah kasus, wilayah kasus dan kebutuhan penanganan bagi saksi atau koraban yang akan dilindungi. (nt) foto:ry/parle/ry

DPR RI Ajak Parlemen Anggota GOPAC Bangun Tatanan Hukum Berantas Korupsi

Ketua DPR Setya Novanto mengajak seluruh parlemen negara-negara yang tergabung dalam Gugus Tugas Parlemen Anti Korupsi dunia (GOPAC) untuk berdiskusi dan berdialog dalam rangka mengali lebih dalam serta membangun tatanan hukum sistem internasional dalam memberantas korupsi yang mengganggu sendi-sendi negara.

“Kurang lebih dua bulan lagi, yaitu tanggal 6-8 oktober, DPR RI akan menjadi tuan rumah Global Organization Against Corruption (GOPAC) di Yogyakarta, Konferensi ini mengambil tema besar yaitu ‘Bringing perpetrators of grand corruption to justice for a sustainable world where all citizens can live in prosperity and equity’ yang akan diadopsi pada September 2015 di PBB dalam Sustainable Development Goals (SDG), dimana goals ke-16 termasuk komitmen untuk mendorong akuntabilitas dan memerangi korupsi,” jelasnya.

Menurutnya, GOPAC meyakini bahwa memerangi *grand corruption* (korupsi yang besar) bukan hanya kunci utama dalam mencapai SDG tetapi juga bagian dari agenda besar untuk mencapai keadilan. “tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa memerangi perilaku korupsi,” tandasnya.

Gugus Tugas Nasional Parlemen Indonesia Anti Korupsi berdiri pada tanggal 12 Desember 2012, ini merupakan lembaga informal dan terdiri dari beberapa anggota Parlemen yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. “Keterlibatan dalam memberantas korupsi sangat penting karena Parlemen memiliki tugas membuat UU yang mengatur, mendeklarasikan UU, serta mengawasi dalam pelaksanaan pemberantasan *grand corruption*,” terangnya.

GOPAC yang akan diselenggarakan di Yogyakarta terbagi atas enam sesi pertama yaitu diskusi mengenai stop



Ketua DPR Setya Novanto

stealing from us : tools and mechanism to build anti corruption prevention system, kedua yaitu grand corruption : let us bring them to justice, sesi ketiga mengenai paralyzing grand corruption and recovering stolen assets.

Berikutnya panel keempat, yaitu *ethic, conduct and governance for accountable and inclusive institutions at all levels*, panel kelima, *increasing women parliamentarians leadership on non traditional issues*, terakhir yaitu panel enam yang merupakan usulan Indonesia yaitu *The high cost institutionalizing democracy*. (Si) foto: *denus/parle/hr*

GOPAC Yogyakarta Momentum Parlemen Dorong Pemberantasan Korupsi



Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf

Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, konferensi *Global Organization Against Corruption (GOPAC)* di Yogyakarta dapat menjadi momentum dalam meningkatkan kepedulian Parlemen dalam memberantas korupsi

di negaranya masing-masing maupun dalam tingkat global.

“Hal ini merupakan kesempatan yang baik dan kepedulian parlemen anti korupsi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam menjalankan politik yang bersih dan jujur,” ujarnya kepada parlemenaria, di Gedung Pustakaloka, Senin, (24/8).

Menurut Nurhayati, pertemuan GOPAC akan terbagi atas enam sesi diskusi mulai dari proses pencegahan dan penindakan korupsi, maupun panel usulan dari Parlemen Indonesia mengenai topik demokrasi yang semakin mahal. “Intinya kita akan menyampaikan pokok pikiran parlemen Indonesia dalam berbagai diskusi dan isu aktual lainnya,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, DPR intinya ingin meningkatkan

sinergitas pemberantasan korupsi diberbagai lembaga sesuai komitmen Parlemen Indonesia yang ingin melakukan pemberantasan korupsi di berbagai bidang. “Kita akan undang juga Pimpinan KPK untuk melakukan diskusi terkait pemberantasan korupsi ini,” jelasnya.

Tema yang diambil dalam konferensi global parlemen dalam pemberantasan korupsi yaitu *bringing perpetrators of grand corruption to justice for sustainable world where all citizens can live in prosperity and equity*. Tema dalam pertemuan keenam ini, yang diselenggarakan di Yogyakarta dalam rangka melakukan konsolidasi terhadap posisi parlemen Indonesia terhadap berbagai isu sekaligus membangun momentum, dalam meningkatkan pemberantasan korupsi. (Si) foto: *denus/parle/hr*

KOMISI IX DPR TERIMA KUNJUNGAN DELEGASI PARLEMEN JERMAN



Komisi IX DPR RI menerima kunjungan delegasi Parlemen Jerman

Komisi IX DPR RI menerima kunjungan delegasi Komisi Tenaga Kerja dan Sosial Parlemen Jerman pada Jumat (21/8/2015) di Ruang Rapat Komisi IX Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta.

Delegasi Komisi Tenaga Kerja dan Sosial Parlemen Jerman yang dipimpin Mathias Bartke diterima Wakil Ketua Komisi IX DPR Pius Lustrilantang didampingi Wakil Ketua Komisi IX Ermalena, Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri dan beberapa anggota Komisi IX DPR.

Menurut ketua delegasi Mathias Bartke, tujuan kedatangannya adalah untuk mengetahui kondisi sosial dan tenaga kerja di Indonesia. “Walaupun kami belum 24 jam di sini, kami telah mendapatkan sedikit informasi mengenai lapangan pekerjaan di sektor formal dan informal, dan kesempatan kerja bagi penyandang cacat,” papar Mathias.

Lebih lanjut dalam kesempatan tersebut, Mathias menyatakan ingin mengetahui bagaimana dengan masalah pekerja anak-anak yang masih di bawah umur, situasinya seperti apa dan bagaimana landasan hukumnya.

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Pius Lustrilantang menjelaskan fungsi dan tugas pokok Komisi IX DPR, serta kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

Sementara mengenai pekerja anak dan pekerja penyandang cacat, dijawab oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena, bahwa Indonesia sudah mengadopsi keputusan ILO Nomor 139 tentang usia minimum anak bekerja, kemudian Nomor 182 tentang penghapusan bentuk pekerja anak di Indonesia. “Itu semua sudah dituangkan dalam Undang-undang tentang perlindungan anak,” kata Ermalena.

Demikian juga untuk pekerja cacat, ujar Lena, Indonesia sudah punya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Untuk penyandang cacat, disebutkan bahwa penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. “Dan fungsi parlemen adalah mengawasi pelaksanaan Undang-undang tersebut,” jelas Ermalena.

“Apakah masih banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun dipekerjakan dan kesempatan penyandang cacat untuk bekerja. Disana-sini memang diakui masih ada masalah, namun itulah tugas kita agar anak-anak kita tidak bekerja demikian juga dengan penyandang cacat mendapat fasilitas untuk bekerja sebagaimana mestinya,” paparnya.

(sc)/foto:naefurodji/parle/iw.



Penandatanganan dan peluncuran Perangko Edisi Anggota DPR oleh Pimpinan DPR RI saat Rapat Paripurna, Jumat (28/08) Foto : Iwan Armanias/Parle/HR



Pimpinan DPR RI saat prosesi pemotongan tumpeng dalam rangka HUT DPR RI ke-70 di Lobby Nusantara, Jum'at (28/08) Foto : Jaka Nugraha/Parle/HR



Pembukaan pameran foto Wartawan DPR "Warna-warni Parlemen" oleh Pimpinan DPR RI, Jum'at (28/08) Foto : Jaka Nugraha/Parle/HR